

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik sebagai organisasi politik dibentuk dengan tujuan khusus. Bisa juga di definisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki tujuan di bidang politik yang sama. Sedangkan fungsi dari partai politik menurut UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik salah satunya adalah pendidikan politik. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya seluruh partai politik yang ada di Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat, yang nantinya bisa dijadikan sebagai ajang pengkaderanisasi partai politik yang bersangkutan. Regenerasi di partai politik (dalam hal ini menggunakan studi kasus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo) sangat diperlukan agar kader-kader di partai akan berkembang menjadi lebih baik.

Selain sebagai wadah untuk pengkaderanisasi, pendidikan politik memang diperlukan masyarakat umum. Norma dan nilai-nilai yang menjadi motivasi serta landasan bagi bangsa Indonesia dan juga sebagai dasar untuk membina dan mengembangkan setiap insan di Indonesia untuk ikut serta dalam kegiatan membangun bangsa dan negara yang sejak dini perlu ditanamkan bagi seluruh masyarakat. Jika masyarakat memiliki segudang aspirasi yang nantinya bisa untuk memajukan minimal daerah mereka akan sangat bermanfaat bagi daerah tersebut. Maka dari itu pemuda-pemuda maupun masyarakat luas perlu diberikan pendidikan yang bersifat politik. Baik nantinya masyarakat akan memilih partai mana yang akan dipilihnya untuk menuangkan aspirasi serta pendapatnya, tetapi pendidikan politik

yang diberikan akan sangat bermanfaat untuk mereka dan daerah maupun Indonesia pada akhirnya.

Pendidikan politik yang diberikan bagi masyarakat oleh partai politik bertujuan untuk membentuk masyarakat yang berkualitas yang nantinya bisa menjadi kader partai politik untuk mendukung kemajuan partai politik yang bersangkutan. Para pemuda yang menjadi sasaran utama partai politik untuk diberikan pendidikan politik yang suatu saat bisa direkrut untuk menjadi kader atau anggota partai politik untuk mewujudkan tujuan dari partai politik. Setiap diadakannya pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, pemuda sering diikutsertakan tetapi hanya untuk meramaikan kegiatan yang diadakan. Dengan diberikannya pendidikan politik, pemuda akan lebih kritis lagi dalam memilih dan mendukung kepala daerah maupun pemimpin negara yang terbaik sesuai dengan keinginan mereka.

Pendidikan politik sebagai proses pembentukan karakteristik bagi pemuda maupun masyarakat luas. Pendidikan adalah sebuah ilmu pengetahuan, budaya dan pelatihan-pelatihan yang membawa perubahan pada setiap individu yang bersangkutan serta sebagai perkembangan keterampilan masing-masing individu yang perlu dituangkan dalam kegiatan yang positif. Sedangkan politik bersangkutan pada praktik kekuasaan, pembuatan keputusan tentang pengalokasian nilai dan sumber daya. Maka dari itu antara pendidikan dan politik adalah dua variabel yang akan saling terkait dan berkesinambungan. Keduanya akan bersinergi untuk membentuk karakteristik individu yang terampil dan mampu mengambil keputusan-keputusan yang terbaik nantinya.

Pendidikan politik yang dilaksanakan terhadap masyarakat di Kabupaten Kulon Progo menekankan usaha pemahaman tentang nilai yang sesuai dengan norma,

yaitu dengan menanamkan kepada masyarakat norma dan nilai – nilai yang merupakan motivasi serta dasar untuk mengembangkan kemampuan setiap individu untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Kulon Progo maupun pembangunan bagi nusa dan bangsa. Maka dari itu pendidikan politik yang diberikan di Kabupaten Kulon Progo adalah proses untuk menurunkan nilai dan norma dasar dari ideologi negara yang dilaksanakan secara baik, benar, sadar, terencana, terorganisir dan berkelanjutan dari semua jenjang usia dalam membentuk kepribadian masyarakat.

Kampanye adalah salah satu kegiatan yang dilakukan partai politik bersama kandidat pemimpin untuk menginformasikan visi, misi serta program yang akan dilaksanakan oleh pemimpin selama periode tersebut. Dalam kegiatan ini jelas mengikutsertakan banyak kalangan masyarakat, dari para pemuda seperti anak SMA sebagai pemilih pemula hingga manula memiliki hak untuk memilih pemimpinnya dalam Pilkada maupun Pemilu. Dengan masyarakat yang kurang dalam hal pendidikan politik akan sangat mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi maupun elite politik. Akan tetapi jika masyarakat terutama pemuda yang menjadi pemilih pemula diberikan pendidikan politik yang baik dalam penyampaian dan pemberian kegiatan yang positif, mereka akan dapat memilih pemimpin dengan baik tanpa harus dimobilisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

Pemuda juga sering diikutsertakan dalam kegiatan kampanye, pada pemilihan umum periode yang lalu-lalu kampanye terbuka kerap menjadi momok bagi masyarakat karena sering terjadi kekerasan dan kerusuhan pada setiap kampanye, untuk itu pemuda perlu diberikan pengetahuan tentang apa itu politik dan bagaimana cara penyampaian kepada masyarakat untuk memilih pasangan yang diusung tersebut agar lebih aman dan masyarakat lebih tertarik. Untuk meningkatkan partisipasi politik

dimasyarakat perlu diberikan pengetahuan tentang politik dan kegiatan yang lebih positif dan terarah, bukan dengan kampanye yang menimbulkan kerusuhan dimasyarakat yang nantinya akan menurunkan tingkat ketertarikan masyarakat dengan partai atau pasangan yang diusung tersebut. Proses demokratisasi yang sehat adalah adanya partisipasi politik dari masyarakat umum. Untuk meningkatkan partisipasi politik serta menumbuhkan keikutsertaan masyarakat perlu dilaksanakan pendidikan politik yang baik dan benar, seharusnya dilaksanakan.

Rush dan Althoff (2000: 124) mengatakan bahwa:

Menguraikan bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan politik atau administratif,
2. mencari jabatan politik atau administratif
3. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi politik
4. keanggotaan pasif dalam suatu organisasi politik
5. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi semu politik
6. keanggotaan pasif dalam suatu organisasi semu politik
7. partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
8. partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik
9. pemberian suara.

Setiajid (2011: 24) mengatakan bahwa :

“Seluruh tingkatan partisipasi politik ini, secara praktis mungkin sekali memiliki perbedaan dalam setiap sistem politik, terutama bila terdapat perbedaan ideologi dominan dalam sistem politik, antara demokratis dan non demokratis karena akan memiliki implikasi yang besar pada pembatasan-pembatasan partisipasi politik masyarakat perluasan-perluasan partisipasi politik.”

Pada pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2014 tingkat partisipasi masyarakat masih terbilang rendah. Di TPS 2 Pedukuhan Kretek Desa Glagah dari

393 DPT hanya sekitar 150 orang yang datang untuk memilih. Selain itu, tingkat partisipasi yang rendah juga terjadi di TPS lain, di TPS 1 Bapangan Glagah dari DPT 321 pemilih dan tambahan 1 pemilih, ada 213 orang yang hadir. Di TPS 3 Kragon, Palihan, dari total DPT 280 yang hadir ada 215 pemilih dengan 200 suara sah. Di TPS 2 Selong, Palihan dari DPT 344 yang hadir mencapai 273 pemilih. (Sumber dari Tribun Jogja)

Partisipasi pemilih terendah terjadi pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2011 lalu. Hanya 69,7% dari 344.850 daftar pemilih tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih. Capaian itu jelas menurun dibanding angka partisipasi pilpres 2009 sebesar 73,46%. Sedangkan angka partisipasi pemilih pada pemilihan presiden tahun 2014 mencapai 79,3%. Dalam pemilihan presiden 2014 memang tingkat partisipasi pemilihnya sudah cukup naik, namun masih banyak masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya dari 335.897 DPT sekitar 69.530 orang tidak menggunakan hak pilihnya. Berbeda dengan partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman pada pemilihan presiden tahun 2014 yang mencapai 81,7% yang tertinggi tingkat partisipasinya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada pilpres 2014. Pada pemilihan legislatif tahun 2004 tingkat partisipasi pemilihnya sebesar 87,04% sedangkan pada pemilihan presiden 2004 mencapai 82,96%. Tingkat partisipasi masyarakat di Kulon Progo masih fluktuatif, diharapkan pada Pemilukada 2017 tingkat partisipasi masyarakat bisa dimaksimalkan.

Berbagai permasalahan menyangkut kader partai politik yang berkembang saat ini membuat masyarakat apatis terhadap pemerintahan dan partai politik. Masalah yang terjadi yaitu masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam aspek regulasi, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintahan. Sementara itu, masyarakat hanya disuguhkan dan dipertontonkan permasalahan seperti pejabat yang tersandung kasus

korupsi dan berbagai konflik kepentingan. Dengan minimnya pengetahuan tentang politik dan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo yang masih cukup rendah menjadi lahan basah bagi calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah untuk melakukan *money politics* sebagai sarana untuk mendapatkan suara terbanyak.

Menurut Heroik Mutaqin Pratama (2014: 67) yang pernah melakukan penelitian tentang *money politics* yang terjadi di Dusun Tunjungan, Desa Pengasih, Kabupaten Kulon Progo pada pemilu legislatif 2014. *Money politics* tersebut dilakukan oleh calon anggota legislatif yang juga berasal dari Dusun Tunjungan. Calon anggota legislatif tersebut melakukan *vote buying* satu hari sebelum hari tenang dengan memberikan uang sebesar Rp. 30.000 kepada masyarakat. Terjadinya *money politics* tersebut menandakan pendidikan politik yang masih cukup rendah dimasyarakat.

Pendidikan politik sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan partisipasi politik masyarakat tanpa harus terjadi *vote buying*. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. dalam jurnal yang dikutip oleh Neny Agustin Irma Yuningsih mengatakan bahwa:

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mengambil keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau kekerasan, legal atau tidak legal, dan efektif atau tidak efektif”.

Jika masyarakat kurang paham mengenai pengetahuan politik dan merasa acuh dengan sistem politik dan beranggapan bahwa sistem politik hanyalah urusan bagi pemerintahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat ditipu dengan janji-janji yang disampaikan kandidat pemimpin yang nantinya jika terpilih penerapannya tidak sama dengan apa yang telah dijanjikan pada saat kampanye.

PDI Perjuangan sebagai partai politik yang cukup kuat di Kabupaten Kulon Progo dengan 8 kursi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Kulon Progo dan

menjadi Kepala Daerah selama 3 periode berturut-turut yaitu H. Toyo Santoso Diponegoro selama 2 periode dan Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.(K) yang masa jabatannya berakhir pada 26 Agustus 2016 dan maju kembali sebagai calon bupati untuk periode 2017-2022. Setiap partai politik berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, maka dari itu PDI Perjuangan sebagai partai politik yang cukup kuat di Kulon Progo juga tetap harus mensosialisasikan pentingnya pendidikan politik tersebut.

Setiap partai politik memiliki tanggungjawab sebagai informan bagi masyarakat untuk memberikan informasi – informasi, nilai, norma – norma serta pendidikan politik kepada masyarakat luas. Begitupula dengan PDI Perjuangan yang memiliki fungsi sebagai informan bagi masyarakat mengenai pendidikan politik. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui hubungan yang baik antara partai politik dengan masyarakat. Hubungan yang terjalin dengan baik antara masyarakat akan sangat bermanfaat bagi partai politik, kegiatan yang diadakan diluar dari kegiatan kampanye justru lebih baik daripada banyak kegiatan yang dilakukan hanya pada saat musim kampanye saja. Tanpa harus dimobilisasi masyarakat akan tertarik dengan partai politik maupun dengan calon pasangan yang diusung oleh partai politik. Pendekatan yang dilakukan melalui kegiatan pemberian pendidikan politik dengan masyarakat akan menimbulkan simbiosis mutualisme antara masyarakat dan partai politik yang bersangkutan. Bagi partai politik, kegiatan tersebut sebagai salah satu cara untuk menarik minat masyarakat agar pada saat diadakan Pemilu maupun Pilkada masyarakat merasa memiliki kedekatan dengan partai politik tersebut. Begitu pula dengan masyarakat, mereka akan mengetahui betapa pentingnya sistem politik tersebut dan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik berlandaskan pada UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PDI Perjuangan sebagai partai yang cukup berpengaruh di Kabupaten Kulon Progo berkewajiban memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran politik bagi masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Dengan struktur masyarakat yang terdiri dari petani maupun peternak serta pemilih pemula yang kurang lebih sebanyak 15.000 perlu diperhatikan dalam hal pendidikan politiknya. Dampak positif dari pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai adalah meningkatnya partisipasi politik, kesadaran politik dan masyarakat bisa ikut berperan serta dalam proses politik.

Diadakannya pembekalan informasi terkait pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada norma-norma yang sesuai dengan adat dan budaya yang ada di daerah, terutama bagi generasi muda yang dipadukan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan yang telah diraih sehingga tujuan yang diinginkan terhadap pendidikan politik ini akan mendapatkan keberhasilannya dan dimanfaatkan dengan baik dan benar serta terwujudnya partisipasi politik yang semakin meningkat. Pemilih pemula di Kabupaten Kulon Progo cukup banyak yaitu sekitar 15.000 pemilih pemula. Selain itu, masyarakatnya masih banyak yang bermatapencarian sebagai petani maupun peternak yang bekerjanya tidak mengenal waktu, yang berakibat pada saat pemilu masyarakat terkadang lebih mementingkan pekerjaannya daripada harus datang untuk menggunakan hak pilihnya.

Pendidikan politik yang masih kurang bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang ditunjukkan dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pada saat pilpres 2014 dari 335.897 DPT sekitar 69.530 orang tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan juga masih rendah, dengan kurangnya antusias masyarakat untuk mengikuti *public hearing* yang dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat Kabupaten Kulon Progo masih kurang. Maka dari itu pendidikan politik bagi masyarakat masih sangat penting dan sangat perlu dilaksanakan, terutama PDI Perjuangan sebagai partai politik yang cukup berpengaruh di Kabupaten Kulon Progo.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, saya selaku penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik PDI Perjuangan Kepada Masyarakat Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2016 (Studi Kasus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo)** ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan serta kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui pendidikan politik yang diberikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dan kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran dari partai politik yang bersangkutan dalam pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dengan data – data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penelitian ini bisa membantu partai politik lain maupun pemerintah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan lebih maksimal serta bisa mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang politik.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi peningkatan kualitas dan kuantitas dari partisipasi politik di masyarakat dan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Kulon Progo.

b. Manfaat Praktis

- Bagi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo bisa untuk ajang meningkatkan kualitas dari kader – kader partai untuk lebih giat memberikan dan menjabarkan kegiatan yang sesuai dengan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.
- Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas partisipasi politik masyarakat dan untuk membentuk karakter politik mereka.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik yang dikemukakan oleh *Alfian* (1986: 235) mengatakan bahwa :

”Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.”

Menurut *Ramlan Surbakti* (1992: 117) mengatakan bahwa :

“Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik.”

Pendidikan politik menurut *Wahab* (Komarudin, 2005: 19) mengatakan bahwa :

“Pendidikan politik secara umum adalah sosialisasi nilai – nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Menurut *Ryas Rasyid* (1999: 72) mengatakan bahwa :

“Pendidikan politik adalah proses untuk membentuk persepsi dan orientasi orang terhadap sistem politiknya, merupakan sarana yang dapat digunakan untuk membangun budaya politik yang baru. Karena kehidupan politik adalah suatu kondisi yang dinamik, maka proses pembentukan persepsi dan orientasi itu seyogyanya terus bergerak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam suatu lingkungan sistem politik.”

Menurut *Kartini Kartono* (1996: 64) mengatakan bahwa :

“Pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader – kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian agar menang dalam perjuangan politik. Selain itu, menurutnya pendidikan politik juga merupakan upaya edukatif yang internasional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang

bertanggungjawab secara etis atau moral dalam mencapai segala tujuan politik.”

Menurut *R. Hayer* yang (1996: 64) mengatakan bahwa :

“Pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipasi yang bertanggungjawab dalam politik.”

Menurut *Rusadi Kantaprawira* dalam bukunya yang berjudul *Sistem*

Politik Indonesia (1988: 54) mengatakan bahwa :

“Pendidikan Politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara nasional dalam sistem politiknya.”

Menurut *Djohermansyah Djohar* yang dikutip oleh Yusriyanti (7:2013)

pendidikan politik dibagi dalam beberapa dimensi, yaitu :

a. Pendidikan Politik melalui Dimensi Ideologis

Masyarakat dididik untuk berpolitik sesuai dengan azas Pancasila dan UUD 1945.

b. Pendidikan Politik melalui Dimensi Struktural

Partai politik diharapkan menyampaikan pendidikan politik secara terstruktur kepada masyarakat maupun kadernya.

c. Pendidikan Politik melalui Dimensi Prosedural

Masyarakat diharapkan menjadikan politik sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan aspirasinya.

d. Pendidikan Politik melalui Dimensi Perilaku

Masyarakat dapat berperilaku politik dengan benar, sopan dan terarah sesuai perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2. Partai Politik

Menurut *Dr. Ichlasul Amal* (2012: xv) menuliskan:

“Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis. Sebagai suatu partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah (legitimate) dan damai.”

Menurut *Mark N. Hagopian* (1978) yang dikutip oleh Dr. Ichlasul Amal (2012: xv) mengatakan:

“Partai Politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip – prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.”

Menurut *Roy C. Macridis* (1967) yang dikutip oleh Dr. Ichlasul Amal (2012: 19) mengatakan:

“Partai politik adalah alat bantu untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah. Partai politik telah digunakan untuk mempertahankan pengelompokan yang sudah mapan.”

Menurut *Redi Panuju* (2011: 34) menuliskan bahwa:

“Partai politik merupakan saluran rasional untuk menampung dan memproses partisipasi politik masyarakat. Dalam suatu negara modern, partai politik mempunyai fungsi yang lebih kompleks diantaranya sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana pengatur konflik”

Menurut *Roy C. Macridis* (1967) yang dikutip oleh Dr. Ichlasul Amal (2012: 29) mengatakan:

“Fungsi dari partai politik adalah memberikan sarana politik secara langsung kepada kepentingan yang diwakilinya. Partisipasi, sosialisasi dan mobilisasi merupakan beberapa varian dari satu keseluruhan fungsi yang esensial, yaitu integrasi. Sosialisasi adalah proses, di mana kumpulan norma – norma sistem politik ditransmisikan (ditukarkan) kepada orang – orang yang lebih muda. Sedangkan mobilisasi adalah varian ekstrem dari sosialisasi, yaitu partai berusaha memasukkan secara cepat sejumlah besar orang yang sebelumnya berada diluar sistem tersebut, juga mereka yang apatis, terasing, tidak tahu menahu

atau takut ke dalam sistem itu untuk menanamkan kepentingan dan menjamin dukungan massa. Partisipasi berada diantara sosialisasi dan mobilisasi, ini menunjukkan bahwa melalui partai disemua sistem, medium ekspresi kepentingan dan partisipasi dalam pemilihan pemimpin dan kebijaksanaan menjadi terbuka untuk semua pihak. Derajat sosialisasi yang paling awal adalah suatu pasca kondisi bagi partisipasi.”

3. Masyarakat Politik

Menurut Sigit Pamungkas (2011: 23) mengatakan bahwa :

“Kader adalah orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan, loyalitas, dan dedikasi tinggi terhadap partai politik, yaitu dimaksud untuk mengganti posisi struktural, mengembangkan, dan atau untuk memperjuangkan kepentingan politik dari partai politik. Sedangkan anggota biasa adalah orang-orang yang bergabung dengan partai politik dan belum berada dalam suatu struktural partai politik, ditujukan untuk dapat menjadi kader dalam partai politik kedepannya.”

Menurut Aryo Prahasto (2017) mengatakan bahwa :

“Simpatisan adalah orang yang bersimpati (kepada partai politik dan sebagainya). Bisa juga seseorang yang memiliki simpati kepada partai politik atau kelompok ataupun seorang figur pemimpin dalam sebuahkelompok dimana biasanya memiliki kesamaan visi dan misi atau juga menandakan sebuah kondisi dimana seseorang atau kelompok memiliki daya tarik besar sehingga menumbuhkan rasa kagum dan hormat. Simpatisan bisa juga berarti kader sebuah kelompok atau bisa juga orang dari luar kelompok yang memang menaruh simpati dan mendukung karena kesamaan identitas baik secara psikologis ataupun alasan subjektif lain setiap individu.”

Menurut Warsito Ellwein (2010 : xvii) mengatakan bahwa :

“Konstituen adalah anggota partai, tetapi karakter keanggotaannya menggan-tung ke atas. Artinya di dalam internal partai anggota tidak memegang peran penting dalampenentuan kebijakan partai atau arah kebijakan partai lebih banyak ditentukan dari atas.Dukungan konstituen terhadap partai politik setiap saat dapat berubah tergantung kepent-ingan sesaat konstituen, isu aktual yang berkembang di publik dan pemahaman konstituenterhadap situasi aktual partai.”

4. Social Networking

Menurut *Michael Rush dan Phillip Althoff* (dikutip dari Rusnaini, 2008: 34)

mengatakan bahwa :

“Komunikasi politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.”

Menurut *Lataya* (2009) yang dikutip oleh Budiyono (2016 : 50) mengatakan

bahwa :

“Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan. Komunikasi politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.”

E. Definisi Konseptual

1. Pendidikan politik adalah proses yang dilakukan untuk mempengaruhi setiap individu agar memperoleh informasi dan keterampilan politik yang akan menciptakan karakteristik individu yang terampil dan mampu mengambil keputusan – keputusan yang terbaik, selain itu masyarakat lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Dalam hal ini partai politik sebagai penyedia informasi atau yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik seharusnya memperhatikan masyarakat sebagai faktor yang penting dan menjadi bagian dari partai politik itu sendiri.
2. Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mengaktifkan dan memobilasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing. Salah satu fungsi dari partai

politik ialah sebagai penyedia informasi tentang pendidikan politik bagi masyarakat, bukan mendoktrin masyarakat dengan berbagai cara yang banyak dilakukan oleh para elite politik saat ini agar terpilih. Hal tersebut menuntut masyarakat untuk memilih calon pemimpin tersebut sebagai calon yang baik dan ideal bagi mereka serta partai politik sebagai wadah untuk masyarakat lebih mengerti tentang politik.

3. Masyarakat adalah sebuah interaksi yang terjadi untuk membentuk sebuah hubungan sosial yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Termasuk pula interaksi antara partai politik dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan politik akan menumbuhkan hubungan yang baik.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasional yang digunakan oleh peneiti untuk penelitian adalah dengan menggunakan Variabel menurut Djohermansyah Djohar yang dikutip oleh Yusriyanti (7:2013).

1. Pendidikan Politik

a. Pendidikan Politik melalui Dimensi Ideologis

Masyarakat dididik untuk berpolitik sesuai dengan azas Pancasila dan UUD 1945.

- 1) Menumbuhkan idealisme yang terkandung dalam Pancasila yang bisa memberikan optimisme dan motivasi
 - 2) Kejelasan informasi tentang pendidikan politik yang sesuai dengan Undang – Undang
 - 3) Meningkatkan kualitas kesadaran politik bagi masyarakat
- b. Pendidikan Politik melalui Dimensi Struktural
- Partai politik diharapkan menyampaikan pendidikan politik secara terstruktur kepada masyarakat maupun kadernya.
- 1) Tahapan – tahapan dalam mensosialisasikan pendidikan politik
 - 2) Sasaran
- c. Pendidikan Politik melalui Dimensi Prosedural
- Masyarakat diharapkan menjadikan politik sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan aspirasinya.
- 1) Memfasilitasi sarana menuangkan aspirasi
 - 2) Sumber dana
- d. Pendidikan Politik melalui Dimensi Perilaku
- Masyarakat dapat berperilaku politik dengan benar, sopan dan terarah sesuai perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- 1) Konsep pendidikan politik
 - 2) Tindakan partisipatif dari pemerintah untuk menunjang pendidikan politik

Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini akan dijelaskan 4 aspek yang bersangkutan dengan metode penelitian, yaitu jenis penelitian, unit analisa, jenis data dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan perihal

yang berhubungan dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, khususnya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo terhadap masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada data yang berwujud kata atau kalimat, dan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang artinya menjelaskan dari variabel satu ke variabel lain. Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat, mengidentifikasi masalah yang terjadi dan membuat evaluasinya.

Penelitian ini dilaksanakan untuk dapat memberi gambaran tentang fenomena-fenomena politik yang terjadi dalam rangka melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten Kulon Progo. Sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam proses pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat dan kendala dalam memberikan pendidikan politik tersebut.

2. Unit analisa

Unit analisa ini dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan melihat tingkat partisipasi politik masyarakat yang masih fluktuatif dan tingkat pendidikan politik yang dilakukan oleh partai-partai masih perlu ditingkatkan untuk menjalankan sebagai fungsi dari partai politik itu sendiri. Objek penelitian yang digunakan adalah pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kulon Progo yang menunjang hasil penelitian.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber yang akurat atau responden. Data primer ini dapat diperoleh melalui studi lapangan dengan cara menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang penulis peroleh dari data yang telah diteliti oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan mencatat dari buku-buku, jurnal dan artikel-artikel. Selain itu terdapat situs maupun website yang diakses untuk mendapatkan keakuratan data. Data sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini akan menggunakan data primer dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan yang telah dipilih. Penulis akan melakukan secara langsung wawancara dengan informan yang dianggap mengetahui dan mengerti secara mendalam terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini responden yang dituju adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo dan pengurus-pengurus partai lainnya yang terkait.

Wawancara tersebut digunakan untuk mengungkapkan cara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat serta faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan dan

kendala dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

b. Studi Pustaka dan Dokumen

Teknik pengumpulan data yang dilakukan berhubungan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menunjang data primer atau data utama yang sudah diperoleh dari informan. Hal ini membantu peneliti dalam menelusuri pembahasan melalui tulisan-tulisan yang pernah diteliti oleh pihak lain tentang masalah yang sama yaitu pendidikan politik.